LAPORAN KINERJA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA KELAPA GADING

2024

PENGANTAR

Dengan rasa syukur dan penuh kebanggaan, kami menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini sebagai bentuk akuntabilitas KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading kepada seluruh pemangku kepentingan. Laporan ini mencerminkan upaya kolektif dari seluruh elemen organisasi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan tujuan membekali sumber daya di lingkungan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Besar harapan kami untuk turut andil dalam penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Perjalanan ini tidak terlepas dari tantangan yang harus kami hadapi. Namun, dengan kerja keras, kolaborasi, dan komitmen yang tinggi, kami berhasil mengatasi tantangan tersebut dan menjadikannya sebagai peluang untuk terus berkembang dan mewujudkan profesionalisme dari seluruh sumber daya di lingkungan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Semoga laporan ini memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai kinerja kami, sekaligus menjadi inspirasi untuk terus melangkah lebih jauh dalam memberikan kontribusi terbaik kepada negara.

Jakarta, 31 Januari 2025
Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik
Vadri Usman

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara. Beralamat di Jalan Walang Baru Raya No 10, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading mulai beroperasi pada tanggal 3 Juli 2007 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-86/PJ/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat.

KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading memiliki wilayah kerja yang terdiri dari Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Timur, dan Pegangsaan Dua. Dalam rangka menjamin pengelolaan SOP secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta menciptakan tertib penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading telah menerapkan pelayanan kepada seluruh *stakeholder* sesuai dengan Standar Prosedur Operasi/*Standar Operating Procedures* Nomor PER-16/PJ/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

Sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak disebutkan bahwa KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dituntut untuk melaksanakan tugas tersebut dengan pruden, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan perwujudan dari salah satu azas penyelenggaraan *good governanance* yaitu azas akuntabilitas dimana kegiatan

Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014).

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading menyelenggarakan fungsi:

a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
m. pemutakhiran basis data perpajakan;
n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;

q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
r. pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan;
s. pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
t. pelaksanaan administrasi kantor.

2. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi KPP Pratama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
b. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerjasama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak; mempunyai tugas melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi pemeriksaan lengkap, pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan dalam rangka penagihan.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu cara untuk mengetahui struktur organisasi adalah dengan melihat bagan organisasi. Sebuah bagan organisasi merupakan gambaran yang mewakili setiap pekerjaan dalam organisasi dan pengaruh pelaporan formal antara pekerjaan. Ini membantu anggota organisasi dan orang luar mengerti dan memahami bagaimana terstruktur bekerja dalam sebuah organisasi. Berikut ini adalah gambar Struktur Organisasi KPP Pratama sebagai berikut:

Data pegawai KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading kondisi s.d. 31 Desember 2024 berdasarkan penyebaran Seksi/Kelompok, Golongan, dan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut:

a. SDM Menurut Penempatan Seksi/Kelompok:

Seksi	Jumlah	Persentase
Kepala Kantor	1	0.94%
Subbag Umum dan KI	10	9.43%
Seksi PKD	4	3.77%
Seksi Pelayanan	19	17.92%
Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	8	7.54%
Seksi Pengawsan I	10	9.43%
Seksi Pengawasan II	6	5.66%
Seksi Pengawasan III	6	5.66%
Seksi Pengawasan IV	7	6.60%
Seksi Pengawasan V	6	5.66%
Seksi Pengawasan VI	7	6.60%
Fungsional Pemeriksa	21	19.81%
TOTAL	**106**	100%

b. SDM Menurut Pangkat/Golongan:

Pangkat/ Golongan	Jumlah	Persentase
Golongan IV/c	0	0,00%
Golongan IV/b	2	1,88%
Golongan IV/a	9	8.49%
Golongan III/d	15	14.15%
Golongan III/c	14	13.21%
Golongan III/b	20	18.86%
Golongan III/a	11	10.37%
Golongan II/d	11	10.37%
Golongan II/c	4	3.77%
Golongan II/b	20	18.86%

Golongan II/a	0	0,00%
TOTAL	106	100%

c. Penyebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

Pendidikan	Jumlah	Persentase
S-3	0	0,00%
S-2	14	13.21%
S-1/D-IV	52	49.05%
D-III	17	16.06%
D-I	22	20.75%
SMA	1	0.94%
SMP	0	0,00%
TOTAL	**106**	100,00%

C. Sistematika Laporan

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, dalam dokumen LAKIN ini diuraikan tentang rencana strategis KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dan analisis terhadap kinerja serta rekomendasi yang ditujukan baik untuk perbaikan kinerja KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading maupun pemerintah di masa mendatang. Secara lebih rinci, muatan dokumen LAKIN ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang dimulai dengan penjelasan Renstra KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading Tahun 2020-2024 khususnya untuk tahun 2024, dilanjutkan dengan penjelasan penetapan/perjanjian kinerja tahun 2025.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

1. **Capaian Kinerja Organisasi**

   Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. **Realisasi Anggaran**

   Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

3. **Kinerja Lainnya**

   Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading pada tahun 2024 meliputi kinerja dalam inovasi manajemen/pelayanan, inisiatif pemberantasan korupsi, penghargaan, dan capaian lainnya.

Bab IV – Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang timbul.

Sesuai dengan SE-447/PJ/2000 perihal sosialisasi dan tindak lanjut penerapan visi, misi, strategi dan nilai acuan Direktorat Jenderal Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, didalam menyusun Visi, Misi, dan Renstranya mengacu pada Renstra induk organisasi sehingga tidak mengaburkan Visi dan Misi dari Direktorat Jenderal Pajak.

A. Perencanaan Strategis

Visi dan Misi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Visi dari KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading adalah "*Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang Unggul dan Dinamis melalui Kerja Cerdas dan Inovatif".* Sedangkan Misi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading adalah *"Menghimpun Penerimaan Pajak Negara yang Optimal dengan Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi melalui fungsi Pelayanan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum dengan SDM yang berintegritas dan Profesional".*

Visi dan Misi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading tersebut di atas berperan dalam mewujudkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak. Artinya Visi dan Misi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sama dengan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak.

Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sebagai bagian dari DJP dan Kemenkeu dalam upaya mendukung peningkatan kinerja berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12

September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang merupakan dasar dan pedoman seluruh pegawainya dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap. Adapun Nilai-Nilai Kementerian Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Integritas, mengandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh pegawai harus berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip moral.

(2) Profesionalisme, mengandung makna bahwa Pinpinan dan seluruh Pegawai dalam bekerja harus melakukannya dengan tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik, penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

(3) Sinergi, mengandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh Pegawai harus memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

(4) Pelayanan, mengandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh Pegawai dalam memberikan pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat dan mudah.

(5) Kesempurnaan, mengandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh Pegawai senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Tujuan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Untuk memberikan arah dan langkah-langkah yang akan diambil tersebut, maka terlebih dahulu disusun suatu tujuan yang ingin dicapai oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

Tujuan yang ingin dicapai oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading adalah *"Meningkatkan koordinasi dan pengawasan diantara seksi-seksi di lingkungan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading untuk pencapaian penerimaan pajak yang telah ditetapkan dan mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak"*.

Sasaran Strategis (SS) KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau suatu hal, secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sedangkan Strategi/ Strategis adalah

pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mengimplementasikan Sasaran Strategis tersebut, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading mengacu pada sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak yang digambarkan kedalam 4 (empat) perspektif sebagai berikut:

(1) Stakeholder Perspective

Perspektif ini dibaca oleh organisasi sebagai: "apa yang harus dicapai organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*". Artinya agar dinilai berhasil, maka KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading harus dapat mencapai target penerimaan pajak yang optimal.

(2) Customer Perspective

Perspektif ini dibaca oleh organisasi sebagai: "apa yang harus dicapai organisasi agar memenuhi keinginan *customer* atau apa yang diinginkan *customer* untuk dipenuhi organisasi". Artinya agar dinilai berhasil, maka KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading harus dapat meningkatkan kepuasan Wajib Pajak yang tinggi atas pelayanan perrpajakan.

(3) Internal Process Perspective

Perspektif ini adalah sudut pandang organisasi yang berfokus pada proses bisnis utama di dalam organisasi. Artinya agar dinilai berhasil, maka KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading harus dapat mengoptimalkan proses internal dalam rangka menciptakan produksi yang optimal untuk memenuhi keinginan *stakeholder* atau Wajib Pajak.

(4) *Learning and Growth*

Perspektif ini menggambarkan kemampuan organisasi untuk melakukan perbaikan dan penguatan sumber daya internal organisasi. Artinya agar dinilai berhasil, maka KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading harus dapat meningkatkan kualitas SDM untuk mendukung tercapainya tujuan kantor.

Program Kerja KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Program yang dimaksud disini adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, guna mencapai sasaran tertentu dan merupakan unsur terakhir dari Rencana Strategis (Renstra).

Untuk mencapai tujuannya, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfungsi sebagai alat ukur bagi pencapaian Sasaran Strategis (SS).

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara dengan Kepala KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Pada Kontrak Kinerja tersebut terdapat peta strategi (*strategy map*) dengan 10 Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap SS yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 19 IKU. Peta Strategi merupakan suatu instrumen yang memetakan SS ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Peta Strategi memudahkan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading untuk mengkomunikasikan seluruh strateginya kepada seluruh pejabat/pegawai dalam rangka memberikan pemahaman demi suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Peta strategi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading tahun 2024 yang tertera di dalam Kontrak Kinerja dapat digambarkan dalam bagan berikut:

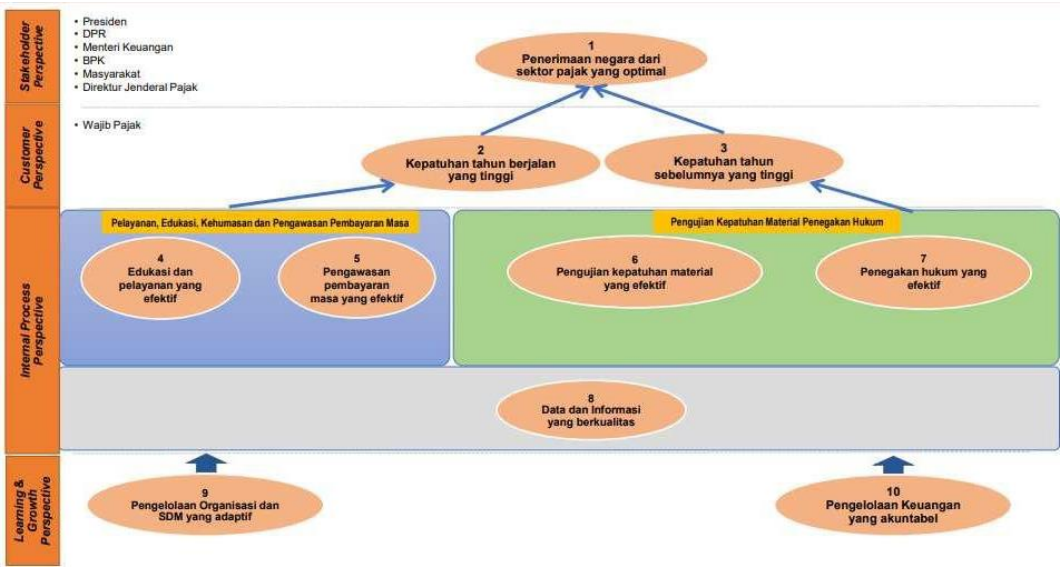

Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat dari 4 (empat) perspektif, yaitu:

a. *Stakeholder Perspektive*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder* (pemangku kepentingan). *Stakeholder* adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung. *Stakeholders perspecitve* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

(1) Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.

b. Customer Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi. *Customer perspective* terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

(1) Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;

(2) Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi.

3. Internal Process Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*). *Internal Process Perspective* terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis, yaitu:

(1) Edukasi dan pelayanan yang efektif;

(2) Pengawasan pembayaran masa yang efektif;

(3) Pengujian kepatuhan material yang efektif;

(4) Penegakan hukum yang efektif;

(5) Data dan informasi yang berkualitas.

4. Learning & Growth Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*. *Learning and Growth Perspective* terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

(1) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;

(2) Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Pada tahun 2024, 10 (sepuluh) Sasaran Strategis tersebut terdiri atas 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masing-masing ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut

Indikator Kinerja Utama		Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	85	85	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit Direktorat Jenderal Pajak disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI baru, hapus, maupun perbaikan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kementerian Keuangan sebagai representasi pengelolaan Kinerja berbasis *Balanced Score Card* (BSC) secara teknis dilakukan Pengukuran Kinerja yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 *output*, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. Perkembangan NKO KPP Jakarta Kelapa Gading dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat digambarkan pada grafik di bawah ini:

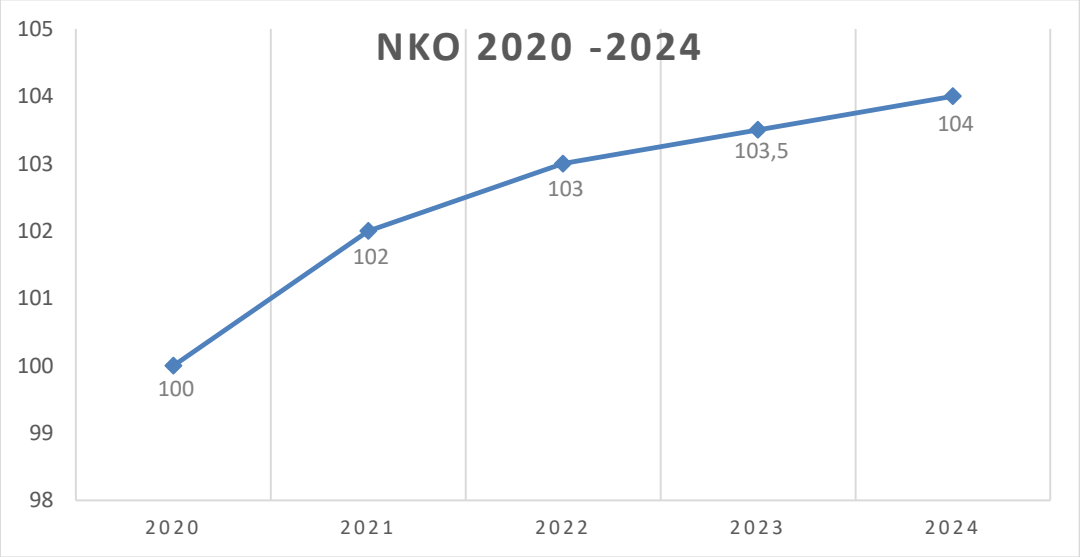

NKO dari tahun 2019 s.d. 2024 selalu tercapai di atas 100 dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024. NKO 2024 terdiri dari 20 IKU dengan capain 104.00, nilai ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 yang sebesar 103.50. Seluruh IKU tahun 2024 mencapai target atau di atas target yang ditetapkan (IKU Hijau).

A. Capaian Kinerja Organisasi:

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

Nama Unit	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal						
	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	51%	51%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	25,22%	52,10%	52,10%	72,11%	72,11%	100,75%	100,75%
Capaian	100,89	102,16	102,16	96,14	96,14	100,75	100,75

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

(1) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

(2) Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

(3) Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

(4) Realisasi IKU

IKU realisasi penerimaan pajak adalah 100,75%, dari jumlah target tahun 2024 sebesar 100,00%, sehingga indeks capaian IKU realisasi penerimaan pajak sebesar 100,75.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	93.24%	104.15%	121.11%	102.20%	100.75%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 mencapai 93.24%, menunjukkan bahwa penerimaan pajak belum mencapai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, persentase realisasi penerimaan pajak menunjukkan kinerja yang positif dengan tren peningkatan hingga tahun 2022 dan stabilitas setelahnya.

Meskipun ada penurunan dari puncak capaian di tahun 2022, pencapaian target yang konsisten di atas 100% dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan efektivitas pengelolaan penerimaan pajak.

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 mencapai target dengan capaian 100,75. Namun demikian, capaian tahun 2024 mengalami penurunan dari 3 (tiga) tahun sebelumnya. Khusus realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2022 yang jauh lebih tinggi dari tahun lainnya terutama disebabkan adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Pencapaian

realisasi penerimaan pajak tahun 2020 s.d 2024 secara konsisten dapat tercapai di atas 100%. Hal ini menunjukkan efektivitas pengelolaan penerimaan pajak yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	-	100%	100.75%

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2024 sebesar 100,75 sedikit di atas target dalam PK.

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	-	100.75%

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

(1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading untuk menunjang capaian realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penelitian dan tindak lanjut data *matching;*
- Penggalian potensi sektor dominan;
- Meningkatkan pengawasan Wajib Pajak dengan peningkatan kualitas surat himbauan dan SP2DK;
- Monitoring dan penerbitan Surat Tagihan Pajak;
- Data perpajakan yang diperoleh lebih berkualitas dan tindaklanjut data yang efektif;
- Komite kepatuhan berjalan semakin baik;
- Peningkatan kinerja kegiatan PPM dan PKM dalam menambah penerimaan pajak;
- Program-program kegiatan pelayanan, edukasi, dan penyuluhan yang berjalan efektif mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

(2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak:

a. Pengawasan Wajib Pajak yang efektif;
b. Manajemen restitusi yang optimal;
c. Kinerja pegawai yang tinggi;
d. Kondisi ekonomi domestik dan sektor usaha dominan relatif stabil;
e. Pengelolaan pengembalian kelebihan pajak yang efektif;
f. Kegiatan pelayanan, edukasi dan penyuluhan mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;
g. Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah melakukan profil WP dari rasio dan tingkat kepatuhan, melakukan analisa data dan keterkaitan hubungan istimewa WP tujuan untuk mengoptimalkan nilai realisasi SP2DK.

(3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading adalah pengelolaan SDM dan anggaran yang optimal dan efisien.

(4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Mengadakan kegiatan *tax gathering;*
- Membuat tim satuan tugas kepatuhan SPT;
- Penggalian potensi Wajib Pajak.

(5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah Melakukan profil WP dari rasio dan tingkat kepatuhan, melakukan analisa data dan keterkaitan hubungan istimewa WP tujuan untuk mengoptimalkan nilai realisasi SP2DK.

(6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading:

- Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan dan kewajiban perpajakan masih kurang;
- Tingkat kepatuhan pelaporan dan/atau pembayaran WP yang masih rendah.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

- Meningkatkan pengawasan, sosialisasi, edukasi, dan penegaan hukum;
- Kolaboratif dengan penyidik Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara untuk Wajib Pajak yang terindikasi melakukan pidana pajak.

(7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melalui anggaran DIPA unit kerja menyediakan sarana prasarana antara lain penyediaan fasilitas ramah disabilitas, usia rentan, dan fasilitas ramah anak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

(8) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi tahun selanjutnya terhadap pencapaian realisasi penerimaan pajak adalah:

- Melakukan profil WP dari rasio dan tingkat kepatuhan;
- Melakukan analisa data dan keterkaitan hubungan istimewa WP tujuan untuk mengoptimalkan nilai realisasi SP2DK;
- Menganalisis kondisi ekonomi regional terkait potensi penerimaan pajak dan risko yang mempengaruhi6 pencapaian targen penerimaan pajak;
- Membuat peta kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan perpajakan dan potensi pajak sektor usaha;
- Optimalisasi kegiatan PKM dan PPM melaui kegiatan edukasi, penyuluhan, pengawasan, pemeriksaan pajak dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
- Optimalisasi kegiatan penyuluhan dan bimtek terkait implementasi Coretax pada tahun 2025;
- Peningkatan kapasitas pegawai, khususnya pegawai pada fungsi pengawasan dan penegakan hokum;
- Monitoring dan evaluasi penerimaan pajak secara periodik.

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Nama Unit	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal						
	1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	101,22	104,22	104,22	109,40	109,40	108,4	108,4
Capaian	101,22	104,22	104,22	109,40	109,40	108,4	108,4

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

(1) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

(2) Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

a. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.

b. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

(3) Formula IKU

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

(4) Realisasi IKU

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada triwulan IV tahun 2024 sebesar 108,40, atau 8,40 lebih besar dari target 100,00 sehingga pertumbuhan realisasi penerimaan

bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas unit kerja KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading adalah sebesar 108,40.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	116.85	108.40

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas baru mulai diukur pada tahun 2023, sehingga belum ada data historis untuk analisis tren jangka panjang. Meskipun realisasi menurun dari 116.85 menjadi 108.40, namun tetap melampaui target.

3. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	-	108.40

4. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

(1) **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading untuk menunjang capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan analisis kegiatan usaha Wajib Pajak sektor usaha dominan yang berdampak material mempengaruhi penerimaan pajak;
- Melakukan kunjungan kerja untuk melihat kegiatan usaha lebih lengkap dan komunikasi yang intens dengan WP untuk mendapatkan proyeksi penerimaan pajak tiap bulannya;
- Pengendalian kegiatan pemeriksaan, pemberian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, pemberian restitusi melalui kegiatan pemeriksaan, dan hasil keputusan/putusan terutama keputusan Keberatan, putusan Banding, dan putusan Peninjauan Kembali;
- Memantau hasil penagihan atas tunggakan pajak yang material yang dapat ditagih;
- Pemantauan terhadap potensi Wajib Pajak baru terdaftar dan akan melakukan pembayaran pajak dengan nilai besar;
- Pengembangan sistem/komunikasi yang baik dari setiap unit kerja sehingga informasi perkiraan pembayaran pajak dapat diperoleh handal dan tepat waktu.

(2) **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas:
  a. Pengawasan Wajib Pajak yang efektif;
  b. Manajemen restitusi yang optimal;
  c. Kinerja pegawai yang tinggi.

- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah meningkatkan analisa angka penetapan deviasi dengan kompilasi data yang optimal.

(3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading adalah pengelolaan SDM dan anggaran yang optimal dan efisien.

(4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Mengadakan kegiatan *tax gathering;*
- Membuat tim satuan tugas kepatuhan SPT;
- Penggalian potensi Wajib Pajak.

(5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

WP yang beroperasi di wilayah Jakarta Utara biasanya berhubungan dengan aktivitas ekspor impor dengan tingkat kepatuhan yang rendah dan lokasi usaha dan administrasi yang sulit dideteksi sehingga membutuhkan usaha lebih untuk melakukan monitoring dan analisa lebih lanjut. Mitigasi risiko yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading untuk memenuhi capaian IKU kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas diantaranya dengan melakukan visit untuk menilai skala usaha dan proyeksi pembayaran pajak terutama beberapa WP dengan nilai PPN Impor dan PPh Pasal impor terbesar.

(6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading:

- WP yang beroperasi di wilayah Jakarta Utara biasanya berhubungan dengan aktivitas ekspor impor dengan tingkat kepatuhan yang rendah dan lokasi usaha dan administrasi yang sulit dideteksi sehingga membutuhkan usaha lebih untuk melakukan monitoring dan analisa lebih lanjut;
- Wajib Pajak importir baru namun melakukan pembayaran pajak yang besar dan tidak/terlambat terdeteksi dengan segera.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

- Meningkatkan pengawasan, sosialisasi, edukasi, dan penegaan hukum;
- Melakukan profiling dan pengawasan pembayaran pajak atas Wajib Pajak yang relatif baru, khususnya importir dan dilakukan dengan kunjungan kerja dan komunikasi;
- Pengawasan dan komunikasi yang intens dengan Wajib Pajak yang pembayaran pajaknya besar dan fluktuatif.

(7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melalui anggaran DIPA unit kerja menyediakan sarana prasarana antara lain penyediaan fasilitas ramah disabilitas, usia rentan, dan fasilitas ramah anak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

(8) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi tahun selanjutnya terhadap pencapaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah:

- Melakukan profil WP dari rasio dan tingkat kepatuhan;
- Melakukan analisa data dan keterkaitan hubungan istimewa WP tujuan

untuk mengoptimalkan nilai realisasi SP2DK;

- Optimalisasi kegiatan pengawasan terhadap Wajib Pajak atau transaksi atau kegiatan usaha yang belum dilakukan pengawasan secara optimal dan berpotensi menambah penerimaan secara pajak material;
- Meningkatkan komunikasi AR dengan Wajib Pajak penentu penerimaan;
- Memperkuat komunikasi dan koordinasi antar seksi (Seksi PKD, Seksi Pengawasan, Seksi P3, Seksi Pelayanan) guna mendapat perkiraan penerimaan pajak yang handal;
- Mengadakan *gathering*/pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak penentu penerimaan pajak;
- Monitoring dan evaluasi kegiatan pengamanan penerimaan pajak secara periodik.

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Nama Unit	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi						
	2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	51%	51%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	N/A	52,65%	52,65%	75,31%	75,31%	100,73%	100,73%
Capaian	N/A	103,24	103,24	100,41	100,41	100,73	100,73

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

(1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

(2) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

(3) Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

(4) Realisasi IKU

IKU realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah 100,73%, 0,73% lebih tinggi dari jumlah target triwulan IV tahun 2024 sebesar 100,00%, sehingga indeks capaian IKU realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar 116,94.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	104.54%	135.84%	105.78%	100.73%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Secara keseluruhan, realisasi penerimaan pajak melalui kegiatan PPM menunjukkan hasil yang konsisten melebihi target dari tahun 2021 hingga 2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam pelaksanaan program pengawasan pembayaran masa, meskipun tantangan seperti penyesuaian kebijakan atau fluktuasi ekonomi bisa menjadi faktor yang mempengaruhi pencapaian pada tahun tertentu.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	-	100.00%	100.73%

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	-	100.73%

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

(1) **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

untuk menunjang capaian realisasi penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penelitian dan tindak lanjut data *matching;*
- Penggalian potensi sektor dominan;
- Meningkatkan pengawasan Wajib Pajak dengan peningkatan kualitas surat himbauan dan SP2DK;
- Monitoring dan penerbitan Surat Tagihan Pajak;
- AR melakukan penelitian dan analisis atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) atas pemenuhan kewajiban perpajakannya melalui data yang diperoleh dari data pemicu/ penguji, maupun analisis mandiri;
- AR menerbitkan himbauan yang telah ditetapkan sebelumnya dari DPP;
- AR melakukan penelitian atas daftar Nominatif dari aplikasi maupun Nota dinas Kanwil atas Wajib Pajak yang terindikasi diterbitkan STP dan menerbitkan STP;
- AR melakukan Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang diterbitkan dan ditindaklanjuti dalam bentuk LHPt;
- Analisa pelaporan Wajib Pajak;
- Pelacakan indikasi ketidakpatuhan WP dalam pelaporan dan pembayaran baik secara formal maupun materiil;
- Segera melakukan klarifikasi kepada Wajib Pajak.

(2) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM):
  a. Pengawasan Wajib Pajak yang efektif;
  b. Manajemen restitusi yang optimal;
  c. Kinerja pegawai yang tinggi.

- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

adalah melakukan profil WP dari rasio dan tingkat kepatuhan, melakukan analisa data dan keterkaitan hubungan istimewa WP tujuan untuk mengoptimalkan nilai realisasi SP2DK.

(3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading adalah pengelolaan SDM dan anggaran yang optimal dan efisien.

(4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Mengadakan kegiatan *tax gathering;*
- Membuat tim satuan tugas kepatuhan SPT;
- Penggalian potensi Wajib Pajak.

(5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi IKU persentase realisasi penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko:

- Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan penambahan Wajib Pajak baru tidak mencapai target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah pengawasan dalam penerbitan SP2DKE;
- Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah melakukan kunjungan ke usaha/lokasi Wajib Pajak;
- Penggalian potensi pengawasan dan pemeriksaan tidak mencapai target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah melakukan rapat koordinasi kinerja penerimaan secara berkala.

(6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading:

- Tingkat kepatuhan pelaporan dan/atau pembayaran WP yang masih rendah;
- Data yang diturunkan tidak selalu merupakan data yang valid;
- Sistem aplikasi pendukung (Aproweb, aportal) masih sering mengalami gangguan eror atau lambat;
- Terdapat *outstanding* dengan nilai potensi beragam, membutuhkan analisa lebih lanjut untuk pengujian nilai potensi dan penyelesaian;
- Respon Wajib Pajak lambat, suat kembali pos, Wajib Pajak tidak ditemukan;
- Wajib Pajak dalam kesulitan keuangan.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

- Meningkatkan pengawasan, sosialisasi, edukasi, dan penegaan hukum;
- Menyeleksi dan memprioritaskan tindaklanjut data perpajakan yang valid dan potensi menambah penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga SP2DK yang diterbitkan lebih berkualitas;
- Memberikan panduan penyelesaian, mempercepat proses tindaklanjut dan pengambilan keputusan SP2DK OS data berjalan yang tidak berpotensi pada penerimaan;
- Meningkatkan pengawasan penyelesaian SP2DK tahun berjalan.

(7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melalui anggaran DIPA unit kerja menyediakan sarana prasarana antara lain penyediaan fasilitas ramah disabilitas, usia rentan, dan fasilitas ramah anak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

(8) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi tahun selanjutnya menyangkut kegiatan PPM baik untuk Wajib Pajak Strategis maupun Wajib Pajak Berbasis Kewilayahan, yaitu:

- Melakukan profil WP dari rasio dan tingkat kepatuhan;
- Melaksanakan kegiatan PPM sesuai dengan ketentuan;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PPM.

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Nama Unit	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi						
	2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	93,29%	110,6%	110,6%	111,40%	111,40%	116,94%	116,94%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	116,94	116,94

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

(1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

(2) Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

1. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
2. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi.

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, *joint operation*, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan

(*Representative Office*), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

(3) Formula IKU

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] \times 100\%$$

(4) Realisasi IKU

Realisasi IKU pada triwulan IV tahun 2024 sebesar 116,94%, dari jumlah target triwulan IV sebesar 100,00%. Sehingga capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebesar 116,94.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	101.88%	102.77%	101.66%	116.94%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mulai diukur pada tahun 2021. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh menunjukkan tren positif dari tahun 2021 hingga 2024, dengan puncak kinerja pada tahun 2024 sebesar 116.94% yang didukung oleh digitalisasi pelaporan pajak (*e-Filing*), intensifikasi pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

3. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	-	116.94%

4. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

(1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading untuk menunjang capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan identifikasi Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan terlambat melaporkan SPT Tahunan pada tahun sebelumnya, untuk prioritas kegiatan terkait kepatuhan SPT Tahunan;
- Melakukan mengidentifikasi WP yang tidak aktif, WP OP meninggal dunia, perubahan alamat/no. telepon/ email dan terhadap WP lainnya yang berisiko tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan;
- Melakukan himbauan untuk melaporkan SPT Tahunan tepat waktu;
- Mengadakan penyuluhan dan kelas pajak pengisian SPT Tahunan secara *on/off line*;
- Melakukan penelitian atas permohonan penghapusan NPWP/Non Efektif dan penelitian secara jabatan atas WP yang memenuhi untuk dilakukan perusahan status menjadi Non Efektif.

(2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian kinerja seperti yang disampaikan di atas dapat berjalan dengan baik, sehingga realisasi mencapai 116,94%. Namun demikian, capaian tersebut belum maksimal yang disebabkan beberapa kendala, yaitu:

a. Terdapat surat himbauan kembali pos dan Wajib Pajak yang tidak dapat dihubungi dan tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan;
b. Wajib Pajak melakukan penundaan penyampaian SPT Tahunan karena sebab tertentu;
c. Terdapat Wajib Pajak yang tidak paham pengisian dan penyampaian SPT Tahunan.

Kendala-kendala tersebut dengan melakukan identifikasi lebih awal termasuk dalam penyusunan daftar Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT yang akan menjadi target IKU. Upaya-upaya untuk mendorong

pelaporan SPT Tahunan tepat waktu perlu dilakukan sejak awal tahun.

(3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Upaya untuk meningkatkan persentase kepatuhan SPT Tahunan terutama dilakukan dan penyuluh. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh AR umumnya dilakukan dengan menjalin komunikasi dengan Wajib Pajak melalui email, telepon, ekspedisi, kunjungan kerja dan tidak banyak memerlukan biaya. Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh umumnya melalui kelas pajak, sosialisasi, bimtek, baik dilakukan secara tatap muka langsung ataupun online atau media masa seperti Instagram, facebook, dan lainnya.

(4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Kegiatan penyuluhan dan pengawasan khususnya terhadap Wajib Pajak baru menghasilkan tingkat kepatuhan yang tinggi pada tahun berikutnya;
- Perbaikan dasar Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT Tahunan turut menaikan tingkat persentase kepatuhan penyampaian SPT Tahunan;
- Kegiatan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang tidak ditemukan/kembali pos telah menghasilkan kenaikan pelaporan SPT Tahunan.

(5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapat. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah melakukan SMS *blast* dan Whatsapp *blast*.

(6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kegiatan pencapaian target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan menghadapi kendala, yaitu:

- Wajib Pajak berpindah alamat, meninggal dunia, meninggalkan Indonesia, mengalami kebangkrutan dan tidak dapat dihubungi;
- Wajib Pajak belum memahami dengan baik cara pengisian SPT tahunan;

- Wajib Pajak melaporkan SPT tidak tepat waktu;

Upaya yang tekah dilakukan untuk mengatasi kendala, yaitu sebagai berikut:

- Melakukan *update* daftar Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan;
- Melakukan pencarian CP Wajib Pajak, melakukan kunjungan kerja, menerbitkan STP/Surat Teguran, koordinasi dengan unit kerja lain;
- Menerbitkan himbauan untuk menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu dan melakukan pemantauan secara memadai;
- Mengadakan edukasi dan penyuluhan penyampaian SPT Tahunan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pencapaian kepatuhan penyampaian SPT Tahunan secara periodik.

(7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melalui anggaran DIPA unit kerja menyediakan sarana prasarana antara lain penyediaan fasilitas ramah disabilitas, usia rentan, dan fasilitas ramah anak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

(8) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi tahun selanjutnya terhadap pencapaian capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah:

- Memelihara daftar Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan secara terus menerus;
- Peningkatan kegiatan pengamanan tingkat kepatuhan tahun berjalan tepat waktu yang tinggi;
- Koordinasi kegiatan peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dengan Kantor Wilayah;
- Monitoring dan evaluasi tingkat kemajuan penyampaian SPT Tahunan secara berkala.

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

Nama Unit	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi						
	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	N/A	45,94%	45,94%	47,44%	47,44%	100,95%	100,95%
Capaian	N/A	91,88%	91,88%	63,26%	63,26%	100,95	100,95

(1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

(2) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

(3) Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

(4) Realisasi IKU

Realisasi IKU pada triwulan IV tahun 2024 sebesar 100,95%, dari jumlah target triwulan IV sebesar 100,00%. Sehingga capaian IKU Persentase

realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah sebesar 100,95.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	-	70.80%	100.95%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) mulai diukur pada tahun 2023, namun kinerja awal kegiatan PKM belum maksimal karena hanya mencapai 70.80% dari target. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM menunjukkan peningkatan yang signifikan antara tahun 2023 dan 2024. Kinerja yang awalnya di bawah target pada tahun 2023 (70.80%) berhasil melampaui target pada tahun 2024 (100.95%). Hal ini mencerminkan upaya perbaikan yang efektif dalam implementasi kegiatan PKM, yang mendukung optimalisasi penerimaan pajak dari pengawasan kepatuhan material Wajib Pajak.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	-	100.00%	100.95%

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	-	100.95%

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

(1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

untuk menunjang capaian penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penelitian dan tindak lanjut data *matching;*
- Penggalian potensi sektor dominan;
- Meningkatkan pengawasan Wajib Pajak dengan peningkatan kualitas surat himbauan dan SP2DK;
- Monitoring dan penerbitan Surat Tagihan Pajak;
- Analisa DPP dengan lebih mendalam dan pelaksanaan monitoring secara berkala.

(2) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM):
  a. Pengawasan Wajib Pajak yang efektif;
  b. Manajemen restitusi yang optimal;
  c. Kinerja pegawai yang tinggi.

- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah melakukan profil WP dari rasio dan tingkat kepatuhan, melakukan analisa data dan keterkaitan hubungan istimewa WP tujuan untuk mengoptimalkan nilai realisasi SP2DK.

(3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading adalah pengelolaan SDM dan anggaran yang optimal dan efisien.

(4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Mengadakan kegiatan *tax gathering;*
- Membuat tim satuan tugas kepatuhan SPT;
- Penggalian potensi Wajib Pajak.

(5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak mencapai target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah pengawasan dalam penerbitan SP2DK.

(6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading diantaranya adalah jangka Waktu SP2DK yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat karena rata-rata WP membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data dan pembukuan. Langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut yaitu meningkatkan pengawasan, sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum.

(7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melalui anggaran DIPA unit kerja menyediakan sarana prasarana antara lain penyediaan fasilitas ramah disabilitas, usia rentan, dan fasilitas ramah anak di KPP

Pratama Jakarta Kelapa Gading.

(8) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi tahun selanjutnya terhadap pencapaian penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah:

- Melakukan pembahasan dan analisa DPP dari awal untuk mengidentifikasi potensi yang dapat segera direalisasikan;
- Optimalisasi kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sektoral WP yang berisiko tinggi atau tematik;
- Penguatan peran Komite Kepatuhan KPP;
- Monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan dari pembuatan LHPt sampai penyelesaian LHP2DK secara berkala;
- Kolaboratif kegiatan PKM dengan PPNS Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara;
- Penguatan peran supervisor dalam bedah Wajib Pajak.

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Nama Unit	Edukasi dan pelayanan yang efektif						
	4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	35,17%	110,84%	110,84%	80,19%	80,19%	88,8%	88,8%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

(1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

(2) Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

a. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak;
b. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak;
c. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku.

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

(3) Formula IKU

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

(4) Realisasi IKU

Target IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada triwulan IV tahun 2024 sebesar 74,00% dengan realisasi sebesar 88,80% sehingga capaiannya sebesar 120,00.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	84.00%	88.80%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2023 mencapai 84.00%, yang menunjukkan bahwa program edukasi dan penyuluhan mulai memberikan hasil dalam mendorong perubahan perilaku Wajib Pajak. Realisasi di tahun 2024 meningkat menjadi 88.80% menunjukkan adanya perbaikan dan keberlanjutan dalam efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan.

3. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	-	88.80%

4. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

(1) **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading untuk menunjang capaian perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Membuat rencana penyuluhan;
- Melakukan penyuluhan secara hibrid, luring dan daring;
- Update media sosial terkait materi-materi penyuluhan.

(2) **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading tahun 2024 didukung oleh kegiatan berikut:

- Melakukan kegiatan edukasi penyuluhan dan sosialisasi kepada WP Badan, OP Non Karyawan dan bendaharawan secara langsung (luring) maupun daring (online) serta melakukan Tax goes to School bagi calon wajib pajak ke sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Melakukan arahan terhadap WP Badan dan OP Non Karyawan yang belum melakukan pembayaran dan pelaporan SPT masa dan/atau Tahunan.

(3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam memenuhi kinerja IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta anggaran secara optimal.

(4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Mengadakan kegiatan *tax gathering;*
- Membuat tim satuan tugas kepatuhan SPT;
- Penggalian potensi Wajib Pajak.

(5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membagun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

(6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading:

- Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan dan kewajiban perpajakan masih kurang;
- Tingkat kepatuhan pelaporan dan/atau pembayaran WP yang masih rendah.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

- Meningkatkan pengawasan, sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum.

(7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melalui anggaran DIPA unit kerja menyediakan sarana prasarana antara lain penyediaan fasilitas ramah disabilitas, usia rentan, dan fasilitas ramah anak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

(8) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi tahun selanjutnya terhadap pencapaian realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah:

- Optimalisasi kegiatan edukasi dan penyuluhan terkait hak dan kewajiban, peraturan-peraturan, aplikasi perpajakan, khususnya aplikasi Coretax;
- Optimalisasi pemantauan atas pemenuhan kewajiban perpajakan terhadapa Wajib Pajak yang dilakukan edukasi dan penyuluhan;
- Penyediaan *call center* atau *contact person* khusus bagai Wajib Pajak yang telah mengikuti kegiatan edukasi dan penyuluhan;
- Monitoring dan evaluasi kegiatan edukasi dan penyuluhan secara berkala.

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Nama Unit	Edukasi dan pelayanan yang efektif						
	4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	5,62%	6,36%	12,53%	18,00%	18,00%	108,32%	108,32%
Capaian	112,40	120,00	120,00	120,00	120,00	108,32	108,32

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

(1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

(2) Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveior mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan

untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP; Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

(3) Formula IKU

Indeks Hasil Survei.

(4) Realisasi IKU

Target IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada triwulan IV tahun 2024 sebesar 100,00% dengan realisasi sebesar 108,32% sehingga capaian IKU sebesar 108,32.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	-	-	108.32%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan yang baru diukur pada tahun 2024 memiliki realisasi mencapai 108.32%, menandakan bahwa pelayanan pajak dan kegiatan penyuluhan telah melampaui ekspektasi atau target yang ditetapkan.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100.00%	-	100.00%	108.32%

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100.00%	-	108.32%

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

(1) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading untuk menunjang capaian Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Membuat *database* lengkap identitas WP untuk memberikan alternatif cara penyampaian informasi survei ke WP;
- Mengingatkan kepada WP jadwal survei yang akan dilaksanakan.

(2) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan didukung oleh penguatan perencanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan meliputi materi, narasumber, media yang digunakan, tempat dan waktu pelaksanaan, kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai.

(3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam memenuhi kinerja IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta anggaran secara optimal.

(4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading ditunjang oleh kegiatan berikut:

- Membuat survei tingkat kepuasan pengguna layanan dan penyuluhan perpajakan;
- Menginformasikan link survei kepada wajib pajak melalui email blast, wa blast, telepon maupun secara langsung.

(5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Rencana aksi atau mitigasi risiko selama tahun 2024 diantaranya:

- Membuat database lengkap identitas WP untuk memberikan alternatif cara penyampaian informasi survei ke WP;
- Mengingatkan kepada WP jadwal survei yang akan dilaksanakan.

(6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kendala yang dihadapi dalam memenuhi capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan adalah sedikitnya minat wajib pajak untuk mengisi survei yang diberikan oleh Seksi pelayanan, sehingga dilakukan pembuatan database lengkap identitas WP untuk memberikan alternatif cara penyampaian informasi survei ke WP serta memberikan reminder kepada WP terkair dengan jadwal survei yang akan dilaksanakan.

(7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melalui anggaran DIPA unit kerja menyediakan sarana prasarana antara lain penyediaan fasilitas ramah disabilitas, usia rentan, dan fasilitas ramah anak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

(8) Rencana aksi tahun selanjutnya

- Penguatan perencanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan meliputi materi, narasumber, media yang digunakan, tempat dan waktu pelaksanaan, kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai;
- Peningkatan kapasitas pegawai terkait peran sebagai penyuluh dan memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak;
- Penguatan monitoring pelaksanaan pemberian pelayanan yang berkualitas dan tepat waktu;
- Penguatan *call center* untuk memudahkan konsultasi dan pemberian informasi kepada Wajib Pajak.

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

Nama Unit	Pengawasan pembayaran masa yang efektif						
	5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	N/A	107,12%	107,12%	114,66%	114,66%	120,00%	120,00%
Capaian	N/A	119,02	119,02	120,00	120,00	120,00	120,00

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

(1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

(2) Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

- Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

(3) Formula IKU

(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis)
+
(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

(4) Realisasi IKU

Target capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa pada triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 90,00%, dengan realisasi sebesar 120,00% sehingga capaian IKU sebesar 120,00.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	133.37%	107.60%	114.72%	120.00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Secara keseluruhan, kinerja setiap tahun selalu melampaui target minimum yang mencerminkan efektivitas pengawasan yang terus terjaga. Realisasi tahun 2024 mencapai 120.00%, yang menunjukkan pengawasan yang efektif dan peningkatan dibandingkan tahun 2023.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	-	90.00%	120.00%

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	-	120.00%

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

(1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading untuk menunjang capaian pengawasan pembayaran masa. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penelitian dan tindak lanjut data *matching;*
- Penggalian potensi sektor dominan;
- Meningkatkan pengawasan Wajib Pajak dengan peningkatan kualitas surat himbauan dan SP2DK;
- Monitoring dan penerbitan Surat Tagihan Pajak;
- Tindakan pelaporan;
- Penerbitan STP, Surat Teguran, himbauan, dinamisasi.

(2) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja pengawasan pembayaran masa. Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja pengawasan pembayaran masa:
  (1) Pengawasan Wajib Pajak yang efektif;
  (2) Manajemen restitusi yang optimal;
  (3) Kinerja pegawai yang tinggi.

- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan pengawasan pembayaran masa adalah:
  (1) Melakukan profil WP dari rasio dan tingkat kepatuhan, melakukan analisa data dan keterkaitan hubungan istimewa WP tujuan untuk mengoptimalkan nilai realisasi SP2DK.

(3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan SDM dan anggaran yang optimal dan efisien.

(4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja pengawasan pembayaran masa merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Mengadakan kegiatan *tax gathering;*
- Membuat tim satuan tugas kepatuhan SPT;
- Penggalian potensi Wajib Pajak.

(5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Sistem pengukuran kinerja Pengawasan Pembayaran Masa oleh AR belum efektif karena pada awal tahun belum muncul menu di aplikasi pengukuran PPM di Mandor sehingga hanya STP yang dafnomnya muncul di Approweb saja yang dihitung sebagai ukuran kinerja. Rencana aksi yang telah dilakukan di tahun 2024 yaitu SP2DK atas data pemicu tahun berjalan dengan memperhitungkan tingkat pencairan, analisa SPT Nihil WP dan setoran masa dari bulan ke bulan.

(6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Pengawasan pembayaran masa dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading:

- Sistem pengukuran kinerja Pengawasan Pembayaran Masa oleh AR yang belum efektif karena awal tahun belum muncul menu di aplikasi pengukuran PPM di Mandor dan hanya STP yang dafnomnya muncul di

Approweb saja yg dihitung sebagai ukuran kinerja demikian juga dengan dinamisasi

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

- Meningkatkan pengawasan, sosialisasi, edukasi, dan penegaan hukum

(7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU pengawasan pembayaran masa memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melalui anggaran DIPA unit kerja menyediakan sarana prasarana antara lain penyediaan fasilitas ramah disabilitas, usia rentan, dan fasilitas ramah anak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

(8) Rencana aksi tahun selanjutnya

- SP2DK atas data pemicu tahun berjalan dengan memperhitungkan tingkat pencairan, analisa SPT Nihil WP dan setoran masa dari bulan ke bulan;
- Mengoptimalkan penyusunan dan pengusulan DSE dari kegiatan hasil analisis mandiri;
- Melakukan pengawasan yang dapat memastikan pemanfaatan data perpajakan tahun berjalan dan termasuk telah ditindaklanjuti;
- Melakukan pengawasan yang dapat memastikan tindaklanjut data dalam Daftar Nominatif PPh kenaikan angsuran Pasal 25 telah ditindaklanjuti;
- Melakukan pengawasan yang dapat memastikan penerbitan atas STP dalam seluruh potensi STP tahun berjalan dalam daftar nominative;
- Monitoring dan evalusai kegiatan pengawasan pembayaran masa secara periodik.

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Nama Unit	Pengujian kepatuhan material yang efektif						
	6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	112,04%	112,04%	110,09%	110,09%	118,08%	118,08%
Capaian	N/A	112,04	112,04	110,09	110,09	118,08	118,08

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

(1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

(2) Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

(3) Formula IKU

(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)
+
(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

(4) Realisasi IKU

Target capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada triwulan IV tahun 2024 sebesar 100,00%, dengan realisasi sebesar 118,08% sehingga capaian IKU sebesar 118,08.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120.00%	92.67%	120.00%	120.00%	118.08%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan mengukur efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan permintaan klarifikasi atau penjelasan terkait data/keterangan. Meskipun kinerja di tahun 2024 sedikit menurun menjadi 118.08% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi tetap berada di atas target dengan selisih 18.08%.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	-	100.00%	118.08%

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	-	108.08%

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

(1) **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading untuk menunjang capaian penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penelitian dan tindak lanjut data *matching;*
- Penggalian potensi sektor dominan;
- Meningkatkan pengawasan Wajib Pajak dengan peningkatan kualitas surat himbauan dan SP2DK;
- Monitoring dan penerbitan Surat Tagihan Pajak;
- AR menyelesaikan dengan membuat Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang merupakan tindak lanjut atas SP2DK yang diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan dan SP2DK *outstanding*;
- Analisa DPP dengan lebih mendalam dan pelaksanaan monitoring secara berkala.

(2) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja pengawasan pembayaran masa:
  (1) Pengawasan Wajib Pajak yang efektif;
  (2) Manajemen restitusi yang optimal;
  (3) Kinerja pegawai yang tinggi.
- Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah melakukan profil WP dari rasio dan tingkat kepatuhan, melakukan analisa data dan keterkaitan hubungan istimewa WP tujuan untuk mengoptimalkan nilai realisasi SP2DK.

(3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading adalah pengelolaan SDM dan anggaran yang optimal dan efisien.

(4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Mengadakan kegiatan *tax gathering;*
- Membuat tim satuan tugas kepatuhan SPT;
- Penggalian potensi Wajib Pajak.

(5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai bentuk mitigasi risiko berkaitan dengan IKU penyelesaian permintaan penjelasan

atas data dan/atau keterangan diantaranya mempercepat proses penyelesaian LHP2DK sesuai dengan target IKU (kurang dari 90 hari), melakukan pembahasan dan analisa DPP dari awal untuk mengidentifikasi potensi yang dapat segera direalisasikan, serta melakukan analisa data dan keterkaitan hubungan istimewa WP tujuan untuk mengoptimalkan nilai realisasi SP2DK.

(6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading:

- Wajib pajak tidak dan/atau kurang merespon himbauan yang diterbitkan;
- Terdapat kendala penyampaian himbauan seperti pindah alamat, lokasi usaha tidak sesuai alamat terdaftar;
- Jangka Waktu SP2DK yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat karena rata-rata WP membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data dan pembukuan.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

- Meningkatkan pengawasan, sosialisasi, edukasi, dan penegaan hukum.

(7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melalui anggaran DIPA unit kerja menyediakan sarana prasarana antara lain penyediaan fasilitas ramah disabilitas, usia rentan, dan fasilitas ramah anak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

(8) Rencana aksi tahun selanjutnya

- Mempercepat proses penyelesaian LHP2DK sesuai dengan target IKU (kurang dari 90 hari).
- Melakukan pembahasan dan analisa DPP dari awal untuk mengidentifikasi potensi yang dapat segera direalisasikan, melakukan analisa data dan keterkaitan hubungan istimewa WP tujuan untuk mengoptimalkan nilai

realisasi SP2DK.

- Memperkuat analisis mandiri yang dilakukan AR serta mengoptimalkan pengalaman supervisor pada kegiatan bedah Wajib Pajak.
- Kolaborasi kegiatan PKM yang dilakukan oleh AR dengan Penyuluh KPP/Penyuluh Kanwil/Penyidik Kwl/KP untuk kasus tertentu atau pertimbangan tertentu.
- Memberikan panduan penyelesain SP2DK OS yang terkendala sebab tertentu, sehingga SP2DK dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan dengan hasil optimal.
- Peningkatan kapasitas AR dalam melakukan analisis potensi pajak dan penyelesiannya.
- Monitoring dan evaluasi kegiatan PKM secara periodik untuk memastikan tindaklanjut DPP dapat diselesaikan pada tahun berjalan dengan optimal.

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Nama Unit	Pengujian kepatuhan material yang efektif						
	6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	114,47%	114,47%	115,79%	115,79%	120,00%	120,00%
Capaian	N/A	114,47	114,47	115,79	115,79	120,00	120,00

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

(1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

(2) Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

(3) Formula IKU

$$\frac{\text{(Capaian pemanfaatan data STP) + (Capaian pemanfaatan Data Matching)}}{2} \times 100\%$$

(4) Realisasi IKU

Target capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sebesar 100,00%, dengan realisasi sebesar 120,00% sehingga capaian IKU sebesar 120,00.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120.00%	120.00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan mulai diukur pada tahun 2023. Konsistensi pada tahun 2023-2024 menunjukkan bahwa proses pemanfaatan data historis telah berjalan secara efektif dan stabil, mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan baru atau peningkatan sistem data.

3. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%		120.00%

4. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

(1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading untuk menunjang capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penelitian dan tindak lanjut data *matching;*
- Penggalian potensi sektor dominan;
- Meningkatkan pengawasan Wajib Pajak dengan peningkatan kualitas surat himbauan dan SP2DK;

- Monitoring dan penerbitan Surat Tagihan Pajak;
- Tindakan pelaporan;
- AR melakukan penelitian atas data selain tahun berjalan dan menindaklanjuti dengan penerbitan LHPt dan SP2DK;
- Analisa DPP dengan lebih mendalam dan pelaksanaan monitoring secara berkala.

(2) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan. Hal-hal tersebut antara lain:

Keberhasilan/peningkatan kinerja pengawasan pembayaran masa:

- Pengawasan Wajib Pajak yang efektif;
- Manajemen restitusi yang optimal;
- Kinerja pegawai yang tinggi.

Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah:

- Melakukan profil WP dari rasio dan tingkat kepatuhan, melakukan analisa data dan keterkaitan hubungan istimewa WP tujuan untuk mengoptimalkan nilai realisasi SP2DK.

(3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading adalah pengelolaan SDM dan anggaran yang optimal dan efisien.

(4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Mengadakan kegiatan *tax gathering*
- Membuat tim satuan tugas kepatuhan SPT

- Penggalian potensi Wajib Pajak

(5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai bentuk mitigasi risiko berkaitan dengan IKU pemanfaatan data selain tahun berjalan diantaranya membuat prioritas data selain tahun berjalan yang terbesar dahulu untuk ditindaklanjuti dengan melakukan analisa yang mendalam, melakukan pembahasan dan analisa DPP dari awal untuk mengidentifikasi potensi yang dapat segera direalisasikan, melakukan analisa data dan keterkaitan hubungan istimewa WP tujuan untuk mengoptimalkan nilai realisasi SP2DK.

(6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

IKU pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading:

- Data yang diturunkan tidak selalu merupakan data yang valid;
- Jangka Waktu SP2DK yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat karena rata-rata WP membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data dan pembukuan.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

- Meningkatkan pengawasan, sosialisasi, edukasi, dan penegaan hukum.

(7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU pemanfaatan data selain tahun berjalan memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melalui anggaran DIPA unit kerja menyediakan sarana prasarana antara lain penyediaan fasilitas ramah disabilitas, usia rentan, dan fasilitas ramah anak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

(8) Rencana aksi tahun selanjutnya

- Membuat prioritas data selain tahun berjalan yang terbesar dahulu untuk ditindaklanjuti dengan melakukan analisa yang mendalam;
- Melakukan pembahasan dan analisa DPP dari awal untuk mengidentifikasi potensi yang dapat segera direalisasikan, melakukan analisa data dan keterkaitan hubungan istimewa WP tujuan untuk mengoptimalkan nilai realisasi

SP2DK;

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindaklanjut data selain tahun berjalan (STP dan data matching) secara berkala.

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Nama Unit	Pengujian kepatuhan material yang efektif						
	6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	300,85%	223,12%	223,12%	108,54%	108,54%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	108,54	108,54	120,00	120,00

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

(1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

(2) Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

(3) Formula IKU

30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

(4) Realisasi IKU

Target capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sebesar 100,00%, realisasinya sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 120,00%, sehingga capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
adalah 120,00.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	120.00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Pengukuran IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu baru dimulai pada tahun 2024. Pada tahun 2024, indikator ini menunjukkan angka 120%, yang berarti realisasi melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak, baik dalam pencapaian target maupun efisiensi waktu.

3. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	-	120.00%

4. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

   (1) **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

   Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading untuk menunjang capaian Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib

Pajak KPP tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menambah bahan DSP4 Semester I
- Menindaklanjuti DSP4 Semester I yang belum terealisasi
- Mempersiapkan DSP4 Semester II

(2) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian kinerja pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak dengan hasil maksimal sebesar 120. Keberhasilan ini disebabkan:

a. Peningkatan koordinasi dan sinergi antar aktor yang terlibat dan unit kerja yang semakin kuat;
b. Penyiapkan bahan baku pemeriksaan yang semakin berkualitas;
c. Kegiatan komite kepatuhan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

(3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam memenuhi kinerja IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta anggaran secara optimal.

(4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Rapat komite dan pembahasan usulan dan penetapan bahan DSP4 efektif dan efisien.

(5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko telah dilakukan pada periode sebelumnya, diantaranya:

a. Penetapan DSP4 Semester I tepat waktu;
b. Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) Tahun 2024;
c. Rapat KKWP untuk membahas penyusunan Strategi Optimalisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2024 serta penyelesaian Laporan Pelaksanaan Tugas KKWP Triwulan I;
d. Menambah bahan DSP4 Semester I;
e. Menindaklanjuti DSP4 Semester I hingga terealisasi.

(6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.

(7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melalui anggaran DIPA unit kerja menyediakan sarana prasarana antara lain penyediaan fasilitas ramah disabilitas, usia rentan, dan fasilitas ramah anak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

(8) Rencana aksi tahun selanjutnya

Dalam rangka menunjang IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu di tahun yang akan datang, berikut rencana aksi yang akan dilakukan:

a. Pembuatan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan tepat waktu.
b. Optimalisasi hasil-hasil kegiatan PKM yang dilakukan pada kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan
c. Optimalisasi pemilihan Wajib Pajak berpotensi yang akan diusulkan dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP)
d. Monitoring dan evaluasi berjalannya Komite Kepatuhan secara periodik

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Nama Unit	Penegakan hukum yang efektif						
	7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

(1) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

(2) Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

(3) Formula IKU

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)
+
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

(4) Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian adalah 120,00%, lebih tinggi 20% dari target triwulan IV tahun 2024 sebesar 100,00% sehingga indeks capaiannya sebesar 120,00.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	-	120.00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Pengukuran IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian baru dilaksanakan pada tahun 2024. Capaian sebesar 120.00% mencerminkan kinerja yang tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target, sehingga menunjukkan perbaikan nyata dalam efektivitas pemeriksaan dan penilaian

3. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	-	120.00%

4. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

(1) **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading untuk menunjang capaian Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Mendorong Fungsional untuk segera menyelesaikan LHP sebelum Jatuh Tempo;
- Memonitoring tanggal jangka waktu penyelesaian LHP (jatuh tempo).

(2) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam memenuhi kinerja IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta anggaran secara optimal.

(3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam memenuhi kinerja IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta anggaran secara optimal.

(4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Kegiatan percepatan pemeriksaan dilakukan dengan maksimal.
- Kualitas hasil pemeriksaan optimal.

(5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko penyelesaian pemeriksaan tidak tepat waktu. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah percepatan penyelesaian pemeriksaan.

(6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Tidak ada kendala berarti dalam pencapaian IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian di tahun 2024.

(7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melalui anggaran DIPA unit kerja menyediakan sarana prasarana antara lain penyediaan fasilitas ramah disabilitas, usia rentan, dan fasilitas ramah anak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

(8) Rencana aksi tahun selanjutnya

Untuk menunjang pencapaian target IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian di tahun yang akan datang, berikut rencana aksi yang akan dilakukan:

- Optimalisasi kegiatan pemeriksaan dengan memperhatikan nilai ketetapan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu, jumlah penyelesaian pemeriksaan (SP2);
- Optimalisasi kegiatan penilaian dengan memperhatikan jumlah penyelesaian, nilai yang dihasilkan, dan waktu penyelesaian kegiatan penilaian;
- Peningkatan sinergi antara AR dan pemeriksa pajak dalam pembuatan analisis risiko pemeriksaan Wajib Pajak yang diusulkan dalam DSPP;
- Monitoring dan evaluasi kegiatan pemeriksaan dan penilaian secara periodik.

IKU Tingkat efektivitas penagihan

Nama Unit	Penegakan hukum yang efektif						
	7b-CP Tingkat efektivitas penagihan						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	24,27%	120,00%	120,00%	96,21%	96,21%	114,77%	114,77%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

(1) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

(2) Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

a. Variabel tindakan penagihan (50%);
b. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
c. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

(3) Formula IKU

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) +
(20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) +
(30% x Variabel Pencairan DSPC)

(4) Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan triwulan IV tahun 2024 adalah 114.77%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan untuk triwulan IV sebesar

75,00% sehingga indeks capaiannya sebesar 120,00.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	111.15%	99.68%	114.77%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

IKU Tingkat efektivitas penagihan mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2022-2024. Tingkat efektivitas penagihan memiliki capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 114.77%.

3. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	-	114.77%

4. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

(1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading untuk menunjang capaian Tingkat efektivitas penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a. Menerbitkan Surat Teguran;
b. Menyampaikan Surat Paksa;
c. Melakukan Penyitaan;
d. Melakukan Pemblokiran;
e. Melakukan Penjualan Barang Sitaan/ Lelang;

f. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini kelurahan untuk penyampaian surat paksa atas wajib pajak yang tidak ditemukan di lokasi.

(2) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan penagihan telah dilaksanakan secara massif dan sesuai dengan ketentuan.

(3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam memenuhi kinerja IKU Tingkat efektivitas penagihan, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta anggaran secara optimal.

(4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tindakan penagihan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

(5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Dalam menunjang capaian Tingkat efektivitas penagihan, berikut kegiatan yang disusun dan dilakukan pada periode sebelumnya:

- Menyampaikan Surat Teguran atas kohir yang telah jatuh tempo;
- Menyampaikan Surat Paksa;
- Melakukan Penyitaan;
- Melakukan Pemblokiran;
- Melakukan Penjualan Barang Sitaan/ Lelang;
- Menindaklanjuti Jaka Pencar.

(6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

a. Wajib Pajak/Penanggung pajak tidak ditemukan atau berpindah alamat.

b. Wajib Pajak dalam kesulitan keuangan.

(7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU Tingkat Efektivitas Penagihan memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melalui anggaran DIPA unit kerja menyediakan sarana prasarana antara lain penyediaan fasilitas ramah disabilitas, usia rentan,

dan fasilitas ramah anak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

(8) Rencana aksi tahun selanjutnya

a. Pengusulan pemeriksaan khusus lebih selektif dengan memperhatikan kemampuan bayar Wajib Pajak;
b. Koordinasi dan/atau kolaboratif dengdan unit kerja lain/pihak lain untuk mengidentifikasi keberadaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
c. Monitoring dan evaluasi kegiatan secara periodik penagihan secara periodik.

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Nama Unit	Penegakan hukum yang efektif						
	7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	200%	200%
Capaian	0	0	0	0	0	120,00	120,00

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

(1) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

(2) Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi

Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

(3) Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x 100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

(4) Realisasi IKU

Target pengusulan bukti permulaan adalah 1 usulan setiap tahunnya, sampai dengan triwulan IV tahun 2024 telah mengusulkan sebanyak 6 usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, Namun yang telah disetujui oleh Kanwil sebanyak 2 usulan, sehingga realisasinya sebesar 200,00% dan capiannya sebesar 120,00.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	200.00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Pada tahun 2024, realisasi menunjukkan capaian 200%, yang berarti penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan melampaui dua kali lipat target yang ditetapkan. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa upaya pengawasan perpajakan semakin efektif, baik dalam cakupan maupun kualitas deteksi pelanggaran.

3. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	-	200.00%

4. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

   1. **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

      Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading untuk menunjang capaian penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain memberikan imbauan kepada AR atau Fungsional untuk mengusulkan Usulan Bukti Permulaan yang berkualitas di semester awal. Sampai dengan Triwulan IV, usulan bukti permulaan di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sejumlah 6 usulan.

   2. **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

      Analisis keberhasilan IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yaitu usulan bukti permulaan berkualitas dan telah dilakukan pembahasan bersama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara.

   3. **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

      Dalam memenuhi kinerja IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta anggaran secara optimal.

   4. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

      Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu kolaborasi antara Seksi Pengawasan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan serta pendampingan dari Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak.

5. **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

   Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko kuantitas dan kualitas usulan pemeriksaan tidak mencapai target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas usulan pemeriksaan.

6. **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

   IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melalui anggaran DIPA unit kerja menyediakan sarana prasarana antara lain penyediaan fasilitas ramah disabilitas, usia rentan, dan fasilitas ramah anak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

7. **Rencana aksi tahun selanjutnya**

   Rencana Aksi yang dilakukan di tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja KU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diatas target antara lain memberikan imbauan kepada AR atau Fungsional untuk mengusulkan Usulan Bukti Permulaan yang berkualitas di semester awal.

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Nama Unit	Data dan informasi yang berkualitas						
	8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	28,79%	137,5%	137,5%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

(1) Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

(2) Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan yang memiliki tujuan untuk menyediakan data potensi pajak yang akurat dan lengkap serta meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan.

(3) Formula IKU

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

(4) Realisasi IKU

Realisasi persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada triwulan IV tahun 2024 sebesar 120,00% dari target 80,00% sehingga indeks capaiannya adalah sebesar 120,00.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	-	150.57%	120.00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Penyelesaian yang konsisten melebihi target menunjukkan bahwa unit kerja memiliki kapasitas yang baik dalam menyelesaikan laporan lebih dari ekspektasi. Hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya penyediaan data potensi perpajakan dapat diandalkan untuk mendukung strategi pengawasan perpajakan.

3. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100.00%	-	120.00%

4. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

(1) **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading untuk menunjang capaian penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain melaksanakan kegiatan pengamatan di tempat Wajib Pajak, serta menginventarisir data yang didapatkan dari hasil respon SP2DK WP serta melakukan perencanaan kegiatan pengamatan.

(2) **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan salah satunya disebabkan oleh adanya kegiatan canvassing, pengamatan, dan KPDL yang optimal di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

(3) **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Dalam memenuhi kinerja IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta anggaran secara optimal.

(4) **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Salah satu program penunjang keberhasilan IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah adanya kolaborasi antara Seksi Pengawasan dengan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan serta adanya kegiatan *canvassing* dan KPDL.

(5) **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pada periode sebelumnya, untuk menunjang capaian penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dilakukan kegiatan pengamatan di tempat Wajib Pajak, serta menginventarisir data yang didapatkan dari hasil respon SP2DK WP serta melakukan perencanaan kegiatan pengamatan.

(6) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melalui anggaran DIPA unit kerja menyediakan sarana prasarana antara lain penyediaan fasilitas ramah disabilitas, usia rentan, dan fasilitas ramah anak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

(7) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2025 dalam rangka mencapai kinerja IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan melebihi target diantarany melakukan kegiatan canvassing dan KPDL yang massif dan lebih luas serta melakukan kegiatan pengamatan yang efektif.

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Nama Unit	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						
	9a-N Tingkat kualitas Kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	104,13%	108,39%	108,39%	120,00%	120,00%	117,46%	117,46%
Indeks Capaian	104,13	108,39	108,39	120,00	120,00	117,46	117,46

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

(1) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

(2) Definisi IKU

IKU ini bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase jumlah pegawai di lingkungan DJP yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya. Selain itu, bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai melalui peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsi untuk mendorong produktivitas pegawai yang mendukung pencapaian tujuan pokok organisasi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak. Di samping itu, IKU ini juga bertujuan untuk mengukur implementasi kebintalan di level unit administrator dalam rangka produktifitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai berjiwa nasionalisme, berintergritas, unggul dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

(3) Formula IKU

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko.

(4) Realisasi IKU

Target Tingkat kualitas Kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada triwulan IV tahun 2024 sebesar 100,00% dengan realisasi sebesar 117,46%, sehingga capaian IKU sebesar 117,46.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	117.46%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM baru mulai diukur pada tahun 2024. Realisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading pada tahun 2024 sebesar 117.46% menunjukkan keberhasilan signifikan dalam pelaksanaan program kebintalan dan pengembangan kompetensi SDM.

3. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100.00%	-	117.46%

4. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

(1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading untuk menunjang capaian Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a. Terkait kompetensi SDM, telah dilaksanakan IHT, sosialisasi, bimtek, dan

FGD dengan materi dan jumlah kegiatannya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan arahan KPDJP;

b. Memastikan bahwa setiap pegawai memperoleh kesempatan dalam melanjutkan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;

c. Melaksanakan program bimbingan mental dengan materi pembinaan mental ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan dengan jumlah kegiatan serta materi sesuai dengan ketentuan nota dinas.

(2) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan kinerja IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading adalah Seluruh Pegawai lulus Uji Kompetensi serta hasil *assessment* Pejabat Pengawas baik dan seluruh kegiatan kebintalan tuntas dilaksanakan.

(3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam memenuhi kinerja IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta anggaran secara optimal.

(4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan penunjang keberhasilan IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM yaitu sosialisasi, IHT, pelaksanaan kebintalan, FGD materi, dan Uji Kompetensi Pegawai.

(5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading untuk menunjang capaian Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM di tahun 2024, antara lain:

- Terkait kompetensi SDM, telah dilaksanakan IHT, sosialisasi, bimtek, dan FGD dengan materi dan jumlah kegiatannya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan arahan KPDJP;
- Memastikan bahwa setiap pegawai memperoleh kesempatan dalam melanjutkan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan program bimbingan mental dengan materi pembinaan mental ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan dengan jumlah kegiatan serta materi sesuai dengan ketentuan nota dinas.

(6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Ketersediaan ruang dan waktu untuk melaksanakan kegiatan harus di mitigasi dengan baik.

(7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melalui anggaran DIPA unit kerja menyediakan sarana prasarana antara lain penyediaan fasilitas ramah disabilitas, usia rentan, dan fasilitas ramah anak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

(8) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading untuk menunjang capaian Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM di tahun 2025, antara lain:

- Terkait kompetensi SDM, telah dilaksanakan IHT, sosialisasi, bimtek, dan FGD dengan materi dan jumlah kegiatannya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan arahan KPDJP;
- Memastikan bahwa setiap pegawai memperoleh kesempatan dalam melanjutkan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan program bimbingan mental dengan materi pembinaan mental ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan dengan jumlah kegiatan serta materi sesuai dengan ketentuan nota dinas.

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

Nama Unit	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						
	9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	N/A	N/A	N/A	85	85	85	85
Realisasi	N/A	N/A	N/A	85	100	92,49	92,49
Indeks Capaian	N/A	N/A	N/A	100	117,65	108,81	108,81

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

(1) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

(2) Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

- pelayanan perpajakan; hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
- pengawasan kepatuhan; hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- pemeriksaan pajak; hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan Pajak;
- penagihan Pajak; hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan Pajak.

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

i. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5);

ii. Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang

terbukti fraud (minus 6);

iii. Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3);

iv. Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3).

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA).

(3) Formula IKU

((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi.

(4) Realisasi IKU

Target indeks penilaian integritas unit pada triwulan IV tahun 2024 sebesar 85,00 dengan realisasi sebesar 92,49 sehingga besar capaiannya adalah 108,81.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	95.55%	95.39%	95.83%	92.49%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit adalah indikator yang mengukur tingkat integritas dalam unit organisasi. Indikator ini mencakup penilaian terhadap kepatuhan, transparansi, akuntabilitas, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Kinerja pada Indeks

Penilaian Integritas Unit berada di atas target (85%) setiap tahun, mencerminkan integritas yang sangat baik secara keseluruhan.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00%	-	92.49%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

(1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading untuk menunjang capaian Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menetapkan Wajib Pajak yang akan diusulkan mengikuti survei dengan tepat serta memastikan alamat, nomor telepon, dan email Wajib Pajak telah sesuai;
- Pegawai di seksi terkait (Pelayanan, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan) secara aktif memantau pelaksanaan survei langsung kepada Wajib Pajak yang diusulkan dalam daftar Wajib Pajak yang dijadikan responden.

(2) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit yang berada diatas target mencerminkan bahwa KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading telah memberikan pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Wajib Pajak.

(3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam pelaksanaan IKU Indeks Penilaian Integritas Unit, pengelolaan Sumber Daya Manusia dan penggunaan anggaran di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading telah dilakukan secara optimal.

(4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan penunjang IKU Indeks Penilaian Integritas Unit diantaranya:

- Edukasi dan layanan penyuluhan yang massif;
- Kegiatan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan;
- Kegiatan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan;
- Kegiatan penagihan dilakukan sesuai dengan ketentuan.

(5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko:

- Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverivikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah menyediakan Sarana Aspirasi dan Pengaduan Internal (NADAGITA).
- Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi. Mitigasi yang dilakukan oleh organisasi adalah penguatan integritas dan kode etik pegawai oleh Kepala Kantor secara berkala.

(6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kendala yang dihadapi terkait dengan IKU Indeks Penilaian Integritas Unit yaitu Survei Penilaian Integritas Unit (SPIU) yang digunakan sebagai dasar penilaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu yang singkat.

(7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melalui anggaran DIPA unit kerja menyediakan sarana prasarana antara lain penyediaan fasilitas ramah disabilitas, usia rentan, dan fasilitas ramah anak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

(8) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi tahun 2025 sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja IKU Indeks Penilaian Integritas Unit di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading antara lain:

- Menetapkan Wajib Pajak yang akan diusulkan mengikuti survei dengan tepat serta memastikan alamat, nomor telepon, dan email Wajib Pajak telah sesuai;
- Pegawai di seksi terkait (Pelayanan, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan) secara aktif memantau pelaksanaan survei langsung kepada Wajib Pajak yang diusulkan dalam daftar Wajib Pajak yang dijadikan responden.

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Nama Unit	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						
	9c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	28,38	61,13	61,13	88,11	88,11	100,00%	100,00%
Indeks Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	111,11	111,11

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

(1) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

(2) Definisi IKU

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko bertujuan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai serta risiko unit kerja di lingkungan DJP. Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

- Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

  Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

- Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

  Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran

berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

(3) Formula IKU

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko.

(4) Realisasi IKU

Realisasi persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada triwulan IV tahun 2024 sebesar 100,00 dari target 90,00 sehingga capaian Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko unit kerja KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading adalah 111,11.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	-	100.00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko baru dilakukan pengukuran di tahun 2024. Realisasi menunjukkan angka 100.00%, yang mengindikasikan pencapaian target sepenuhnya. Nilai ini menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja dan manajemen risiko telah diimplementasikan secara efektif sesuai dengan standar atau target yang ditetapkan untuk tahun 2024.

3. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00%	-	100.00%

4. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

(1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading untuk menunjang capaian Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara

lain:

- Monitoring implementasi Rencana Aksi Penanganan Risiko;
- Menyusun Manajemen Risiko untuk mengakomodasi resiko yang belum terindikasi;
- Melaksanakan sosialisasi dan imbauan kinerja secara berkala triwulanan.

(2) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading pada tahun 2024 berhasil mencapai target IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, hal ini disebabkan oleh pembahasan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) secara komprehensif. Unit kerja telah melakukan langkah-langkah mitigasi risiko dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan penggunaan anggaran terkait dengan IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading telah dilakukan secara optimal.

(4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Salah satu program/kegiatan yang menunjang keberhasilan IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading adalah terselenggaranya Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) yang efektif serta pelaksanaan kegiatan mitigasi risiko yang sesuai dengan ketentuan.

(5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan Rapat DKO dengan efektif dan tepat waktu, dilakukan mitigasi terhadap IKU yang belum maksimal dan melakukan dialog kerja organisasi, diselenggarakan IHT imbauan kinerja dan pengarahan serta sosialisasi terkait manajemen kinerja, menetapkan piagam MR dengan target serta menetapkan sasaran organisasi, kejadian risiko, dan indikator risiko secara cermat, dan melakukan monitoring rencana aksi.

(6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kendala yang dihadapi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dalam melaksanakan IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko adalah menentukan rencana aksi dan penetapan mitigasi risiko yang dinilai kurang optimal.

(7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melalui anggaran DIPA unit kerja menyediakan sarana prasarana antara lain penyediaan fasilitas ramah disabilitas, usia rentan, dan fasilitas ramah anak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

(8) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi dalam rangka mencapai target IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading di tahun 2025 antara lain:

- Melakukan monitoring implementasi Rencana Aksi Penanganan Risiko;
- Menyusun Manajemen Risiko untuk mengakomodasi resiko yang belum terindikasi;
- Melaksanakan sosialisasi dan imbauan kinerja secara berkala triwulanan.

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Nama Unit	Pengelolaan keuangan yang akuntabel						
	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Indeks Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024**

(1) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

(2) Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARaT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan

Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

(3) Formula IKU

Triwulan1 s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00<Realisasi IKKPA<95,00)
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA – 80) : 0,55 *	(80,00<Realisasi IKKPA<91,00)
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

(4) Realisasi IKU

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada triwulan IV tahun 2024 memiliki realisasi sebesar 120,00 dari target 100,00. Sehingga Capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah 120,00.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	115.04%	120.00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran mulai diukur pada tahun 2023. Realisasi sebesar 120.00% di tahun 2024 menunjukkan peningkatan kinerja

dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pencapaian yang lebih tinggi dari target. Hal ini menunjukkan pelaksanaan anggaran berjalan sangat baik pada tahun 2024.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95.50%	-	100.00%	120.00%

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00%	100.00%	120.00%

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

(1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading untuk menunjang capaian Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan rapat yang membahas DIPA, sehingga semua elemen di satker mengetahui kondisi dan peruntukan DIPA satker;
- Melakukan penyesuaian anggaran melalui revisi anggaran;
- Melakukan optimalisasi penyerapan anggaran secara efektif dan sesuai

ketentuan;

- Melakukan percepatan belanja barang dan jasa;
- Melakukan peningkatan ketepatan rencana penarikan dana;
- Melakukan mitigasi antara kesesuaian target output dengan realisasi;
- Melakukan efisiensi anggaran.

(2) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran berhasil melebihi target di tahun 2024. Penyebab keberhasilan kinerja KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading antara lain:

- Penyerapan anggaran optimal;
- Target output sesuai dengan realisasi;
- Efisiensi anggaran maksimal.

(3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran antara lain:

- Revisi anggaran;
- Monitoring dan evaluasi atau *zoom meeting* dengan KPPN (Kantor Pusat DJP).

(5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko:

- Pembebanan dan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan ketentuan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah melakukan penyesuaian anggaran melalui revisi anggaran;
- Nilai IKPA dan PKPA tidak mencapai target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah melakukan rapat pembahasan anggaran secara berkala.

(6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading terkait dengan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah perubahan kebijakan penggunaan anggaran. Hal ini dihadapi dengan melakukan monitoring dan evaluasi atau *zoom meeting* dengan KPPN (Kantor Pusat DJP).

(7) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melalui anggaran DIPA unit kerja menyediakan sarana prasarana antara lain penyediaan fasilitas ramah disabilitas, usia rentan, dan fasilitas ramah anak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

(8) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dalam rangka mendukung pencapaian kinerja IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, antara lain:

- Melakukan rapat yang membahas DIPA, sehingga semua elemen di satker mengetahui kondisi dan peruntukan DIPA satker;
- Melakukan penyesuaian anggaran melalui revisi anggaran;
- Melakukan optimalisasi penyerapan anggaran secara efektif dan sesuai ketentuan;

B. Realisasi Anggaran

1. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Unit (perjenis belanja) 5 (lima) Tahun Terakhir

Seluruh kegiatan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2024, realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp924.580.000.- (96.51% dari pagu sebesar Rp958.024.000.-), belanja barang mencapai sebesar Rp5.73B1.995.285.- (98.69% dari pagu sebesar Rp5.808.141.000.-), dan belanja modal sebesar Rp362.669.190.- (99.92% dari pagu sebesar Rp362.969.190.-). Adapun rincian realisasi per jenis belanja selama tahun 2024 dapat ditunjukkan pada Tabel berikut.

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	958.024.000	924.580.000	96.51%
2.	Belanja Barang	5.808.141.000	5.731.995.285	98.69%
3.	Belanja Modal	362.969.000	362.669.190	99.92%
	Jumlah	**7.129.134.000**	**7.019.244.475**	**98.37%**

2. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Unit Tahun 2024 Perkegiatan/Output

Penyerapan anggaran KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading secara keseluruhan pada tahun 2024 adalah sebesar 98.49%. Realisasi per kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Kegiatan		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	%
1.	CC.4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara		201.713.000	158.844.749	78.75 %
2.	CC.4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi		339.921.000	336.870.310	99.10 %
3.	CC.4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum		422.928.000	397.722.317	94.04 %
4.	WA.4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		5.204.222.000	5.201.227.099	99.94 %

5.	WA.4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM		958.024.000	924.580.000	96.51 %
Total				**7.126.808.000**	**7.019.244.475**	**98.49%**

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Keuangan) yang Terkuantifikasi

Dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Untuk mengukur optimalisasi pengelolaan anggaran dari sisi penyerapan dan pencapaian *output* secara efisiensi anggaran dapat tercapai, telah tersedia Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (Aplikasi SMART).

Adapun nilai KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melalui aplikasi SMART pada tahun 2024, yaitu sebagaimana tabel berikut.

Variabel Pengukuran Kinerja	Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
Efektifitas	Capaian Rincian Output	100.00	75.0%	75.00
Efisiensi	Penggunaan SBK	100.00	10.0%	10.00
	Efisiensi SBK	100.00	15.0%	15.00
Nilai Kinerja Anggaran (SMART)				**100.00**

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi pemanfaatan sumber daya merupakan faktor utama dalam keberhasilan organisasi mencapai tujuannya. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, keuangan, teknologi, material, dan waktu. Dengan mengelola sumber daya secara optimal, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, menekan biaya, dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah langkah-langkah yang telah dilakukan oleh unit kerja selama tahun 2024:

a. Melakukan verifikasi antara data anggaran dan data realisasi dari tahun sebelumnya;

b. Menyelenggarakan pelatihan pengadaan barang dan jasa untuk para petugas terkait;
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin guna memastikan anggaran digunakan sesuai rencana;
d. Mengadakan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal tetap efektif dan relevan.

D. Kinerja Lain-Lain

1. Inovasi Manajemen/Pelayanan

a. Kacamata Baca

KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading menyediakan kacamata baca bagi Wajib Pajak yang berusia lanjut atau menderita rabun jauh maupun rabun dekat agar dapat membaca dengan lebih jelas saat menerima layanan di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

b. SIBAK

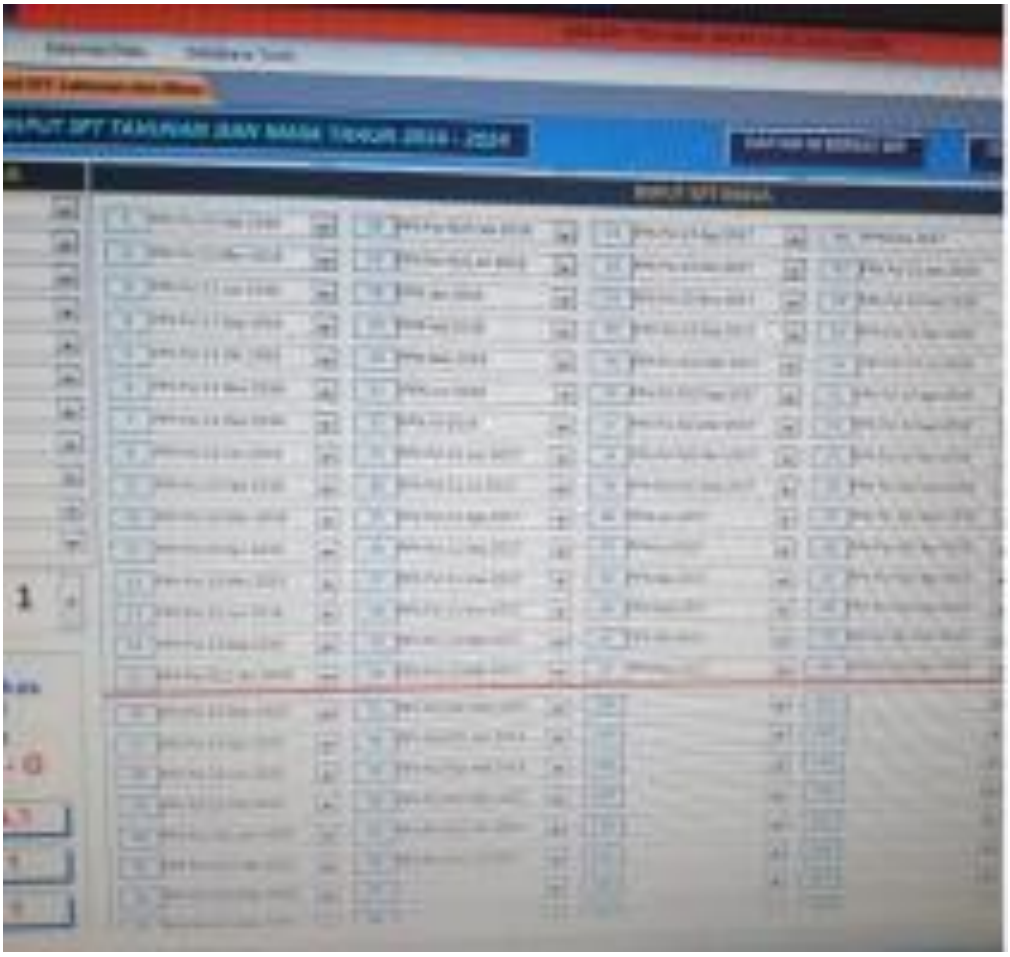

KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading menyusun aplikasi bernama Sarana Informasi Berkas Administrasi Kelapa Gading dalam rangka menciptakan dan membuat manajemen berkas Wajib Pajak yang terorganisir.

c. NADAGITA

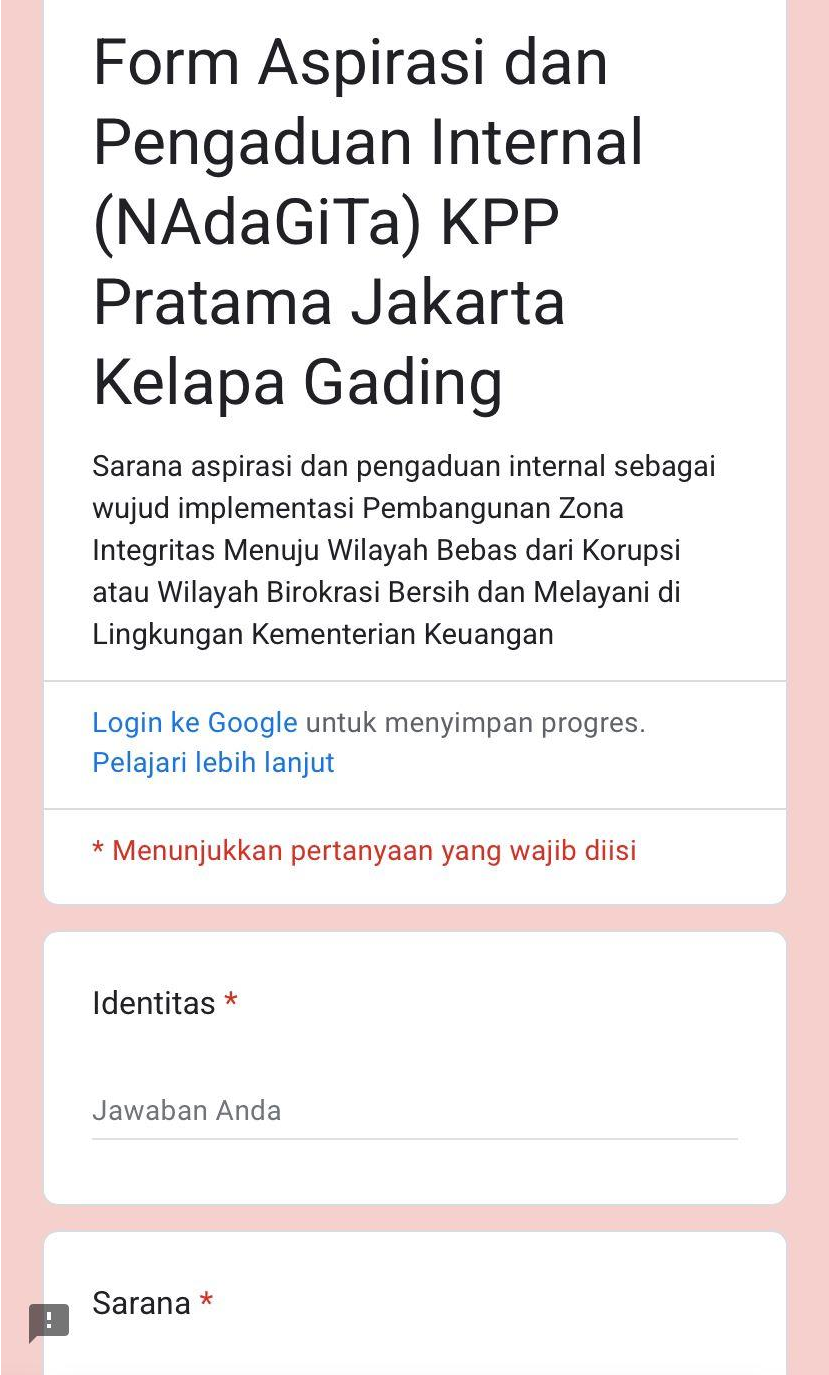

Form Aspirasi dan Pengaduan Internal (NAdaGiTa) KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Sarana aspirasi dan pengaduan internal sebagai wujud implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Keuangan

Login ke Google untuk menyimpan progres. Pelajari lebih lanjut

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Identitas *

Jawaban Anda

Sarana *

Sarana Aspirasi dan Pengaduan Internal (NAdaGiTa) adalah inovasi berupa tautan yang dapat digunakan oleh pegawai KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dalam menyalurkan aspirasi maupun pengaduan internal yang lingkupnya berada di lingkungan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi

Pada tahun 2024, upaya pengendalian gratifikasi (UPG) pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dilaksanakan melalui penyebaran anti gratifikasi pada sosial media dan media lainnya.

Sosialisasi mengenai gratifikasi juga dilaksanakan di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, diantaranya:

a. Sosialisasi kepada pihak internal (seluruh pegawai) pada tanggal 22 Mei 2024 sesuai dengan ND-1471/KPP.2105/2024 dan pada tanggal 5 Desember 2024 sesuai dengan ND-3542/KPP.2105/2024;
b. Sosialisasi kepada pihak eksternal (Wajib Pajak) telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024 sesuai dengan ND-1553/KPP.2105/2024;
c. Integrity Sharing oleh Kepala KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading pada 7 Agustus 2024 sesuai dengan ND-2162/KPP.2105/2024 tanggal 5 Agustus 2024;
d. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Judi Online dalam rangka Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2024 pada 19 November 2024 sesuai dengan ND-3391/KPP.2105/2024 tanggal 14 November 2024;
e. Sosialisasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan, Core Values Aparatur Sipil Negara dan Antigratifikasi dalam Rangka Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada 5 Desember 2024 sesuai dengan ND-3542/KPP.2105/2024 tanggal 3 Desember 2024.

3. Sertifikat, Penghargaan dan Apresiasi

a. Piagam Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading pada tahun 2023 mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Berkolaborasi dengan Tim Penilai Nasional:
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia
menetapkan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Kelapa Gading

sebagai unit kerja berpredikat menuju
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Jakarta, 13 Desember 2023

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI

b. Piagam Penghargaan Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Nilai 100 Periode Triwulan III Tahun 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DJPB PROVINSI DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA II

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA KELAPA GADING

sebagai

Satuan Kerja Dengan Capaian IKPA Nilai 100
Periode Triwulan III Tahun 2024

Jakarta, 31 Oktober 2024
Kepala KPPN Jakarta II

Ditandatangani secara elektronik
Setyarta

Merupakan penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi DKI Jakarta yang diberikan pada tanggal 10 Oktober 2024 kategori Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Nilai 100 Periode Triwulan III Tahun 2024.

c. Piagam Penghargaan Tim Pengelola Jejaring Sosial Terbaik

djp

KANWIL DJP JAKARTA UTARA

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: SERT-184/WPJ.21/2023

dengan bangga kami berikan kepada

KPP PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING

atas capaiannya sebagai

Peringkat 3

Tim Pengelola Jejaring Sosial Terbaik

Jakarta, 13 November 2023

Plt. Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara

Dodik Samsu Hidayat

Tim Pengelola Jejaring Sosial KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading memperoleh penghargaan sebagai Peringkat 3 Tim Pengelola Jejaring Sosial Terbaik dari Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara pada 13 November 2023.

d. Piagam Penghargaan Tim Penyuluh Terbaik

djp

KANWIL DJP JAKARTA UTARA

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: SERT-186/WPJ.21/2023

dengan bangga kami berikan kepada

KPP PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING

atas capaiannya sebagai

Peringkat 2

Tim Penyuluh Terbaik

Jakarta, 13 November 2023

Plt. Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara

Dodik Samsu Hidayat

Tim Penyuluh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading memperoleh penghargaan sebagai Peringkat 2 Tim Penyuluh Terbaik dari Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara pada 13 November 2023.

4. Implementasi Pengarusutamaan Gender

Guna memperkenalkan Pengarusutamaan Gender (PUG) baik kepada pegawai KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading maupun kepada *stakeholder*, dilakukan penunjukan Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Kepala KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading nomor KEP-97/KPP.2105/2024.

Kebijakan Penyediaan Sarana dan Prasarana PUG

Ruang Laktasi

Toilet terpisah pria dan wanita dengan fasilitas difabel

Jalan landai dengan pegangan lambat

Area Parkir khusus difabel

Area parkir khusus wanita

Area ramah anak

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Program evaluasi internal untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan tindak lanjut atas rekomendasi yang dilakukan oleh unit kerja, antara lain:

1. Menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik dari evaluasi, misalnya untuk mengukur kinerja, mengidentifikasi area perbaikan, atau memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
2. Menganalisis data yang telah terkumpul untuk mengidentifikasi tren, pola, dan temuan utama.
3. Menyusun laporan evaluasi yang komprehensif, yang mencakup temuan utama, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa rencana aksi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

BAB IV
PENUTUP

1. Simpulan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading pada tahun 2024 memiliki 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) yang kemudian dibagi menjadi 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading Tahun 2024 kemudian ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading Nomor 11/WPJ.21/2024 dengan indeks capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110.78 (kategori hijau/memenuhi ekspektasi).

2. Tindak Lanjut

Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai di atas kiranya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Sementara untuk beberapa program/kegiatan yang capaian kinerjanya belum mencapai target sebagaimana direncanakan akan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh *stakeholder* yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading pada periode berikutnya.